



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Pesantren Kudu Bebas Dari Perilaku Kekerasan!
Tanggal	: Selasa, 05 Maret 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 5

Pesantren Kudu Bebas Dari Perilaku Kekerasan!

SEJUMLAH kalangan sepakat, pesantren harus bebas dari perilaku kekerasan. Hal ini terkait peristiwa yang menimpah BM (14), santri Pondok Pesantren Tariqul Qur'an (PPTQ) Al Hanifiyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi korban dugaan pengerianyaan hingga meninggal dunia.

Penjabat (PJ) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin meminta semua phak, baik pesantren maupun orang tua, saling introspeksi pasca meninggalnya santri di Kediri. Dia berharap, peristiwa serupa tidak terulang dan menjadi bahan evaluasi bersama.

"Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada anak-anak BM. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Semoga ini menjadi tragedi terakhir yang terjadi di lingkungan pesantren," ujar Gus Kikin dalam siaran persnya, Minggu (3/3/2024).

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng ini menambahkan, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi pam-pengurus dan pengasuh pesantren. Karenanya, pengelola ponpes harus selalu adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di



KH Abdul Hakim Mahfudz

pendidikan berjalan semakin baik ke depan," katanya.

Ketua Komisi VIII DPR A shabul Kahfi meminta Pemerintah memperketat regulasi dan pengawasan terhadap pondok pesantren.

“Dia mengingatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari akar masyarakat, memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan spiritualitas santri. “Namun, kejadian ini menunjukkan perlunya upaya pengawasan dan penjaminan kualitas pembelajaran yang aman dan kondusif,” ujar Kahfi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai,

terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perbaikan harus terus berjalan. Namun tetap menjadikan nilai-nilai luhur pesantren sebagai inspirasi dan pedoman. Pesantren harus membimbing keséharian para santri,” jelas dia.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukuwah KH Cholil Nafis mengatakan, peristiwa kekerasan di pesantren harus menjadi muhasabah semua penyelenggara pendidikan.

“Bully kan sebenarnya bukan hanya pesantren. Kita waspada saja dan evaluasi diri,” pesannya.

Khai Cholil mengaku, usai mengetahui berita kasus kekerasan di pesantren yang ada di Jawa Timur itu, dia langsung memberikan arahan di ponpes yang dia掌管nya. “Ini harus diikuti dengan aksi nyata dalam bentuk regulasi yang lebih ketat dan efektif, serta pengawasan yang lebih intensif,” ujar dia.

Di media sosial X, netizen juga mendesak agar pesantren bebas dari perilaku kekerasan. Akun @savicali mendesak kasus kekerasan di pesantren diusut tuntas.

“Saya sebagai pengasuh pesantren langsung rapat. Jangan sampai ada yang bangun tengah malam, jangan sampai lepas pengawasan,” cetusnya.

Sementara, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) langsung merumuskan sejumlah langkah kuratif dan preventif agar kasus serupa tidak terulang.

“Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan tentang pesantren ramah anak dan menyusun regulasi tentang penanggulangan kekerasan di pesantren.” tulisnya.

Akun @ahmadmasnur mengatakan, selaku orang tua dia waswas dengan terkuaknya kasus kekerasan di pesantren.

“Perlu koordinasi jeiring

pondok pesantren untuk menghilangkan kasus bullying di pondok. Saya pernah merasakan

perasaan cemas saat anak saya

yang di pondok minta boyong

karena mendapatkan perlakuan

kurang mengenakkan dari sesa-

ma santri,” sebutnya.

Anak Indonesia (KPAI). Kedepan, kami akan terus melakukan sosialisasi tentang pesantren ramah anak, mengingatkan kepada pesantren untuk memiliki izin operasional, dan menyusun sejumlah aturan tentang penanggulangan kekerasan di pesantren.

“Kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di pesantren karena nggak ada transparansi, komunikasi, dan kontrol yang cukup antara pihak pesantren, anak, dan orang tua. Sudah waktunya ada undang-undang atau peraturan baru, problemnya sudah sistematis,” cuitnya. ■ OSP